



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
TAHUN 2021**



## BUPATI PATI

### KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 950/2269      TAHUN 2020

### TENTANG

### RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2021

BUPATI PATI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dalam penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilakukan pemetaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI PATI,



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PATI**  
**NOMOR 050/2269 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 periode (satu) tahun yang membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Pati. Dimana RKPD Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pati, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian RKPD Kabupaten Pati Tahun 2021 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa

merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2021 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pati.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dan melihat kemampuan keuangan daerah, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka Renja PD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/DPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Pati.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
24. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pati Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 dan terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu untuk memberikan informasi pencapaian program kerja tahun sebelumnya berikut kendala yang menyertainya.

Tujuan Renja PD adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Tahun 2021. Disamping itu juga dapat digunakan untuk :

- a. Sinkronisasi program kerja antar PD agar tercipta peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas;
- b. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Terbitnya Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati otomatis merubah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, dimana capaian target Renstra juga mengalami perubahan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta mensikronkan sesuai RPJMD Kabupaten Pati.

Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati melaksanakan 6 Program dengan 34 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.255.234.000,00 sedangkan pada Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati melaksanakan 6 Program dengan 33 Kegiatan dengan anggaran (DPA) sebesar Rp. 1.266.895.000,00, tapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan melanda seluruh wilayah Indonesia maka sekitar bulan Maret tahun 2020 dilakukan *refocusing* / realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Dimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah refocusing berkurang menjadi Rp. 837.172.000,00.

Hasil evaluasi Renja tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 terdapat sebanyak 6 program dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 34 kegiatan, semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Secara umum realisasi capaian keuangan sebesar 90,50% dan untuk realisasi kinerja sebesar 99%, dengan predikat sangat tinggi.
2. Jumlah kegiatan tahun 2019 yang memenuhi target kinerja atau penyerapan anggaran sebesar 91-100% sebanyak 19 kegiatan, atau 55,88%, kegiatan yang memenuhi target kinerja atau penyerapan anggaran sebesar 76-90% sebanyak 12 kegiatan, atau 35,29%, sedangkan kegiatan yang berada dibawah target kinerja atau penyerapan anggaran kurang dari 75% sebanyak 3 kegiatan, atau 8,82%.
3. Untuk kegiatan Renja tahun 2018 semua dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.
4. Untuk program kegiatan Renja tahun 2020 pelaksanaan sampai dengan posisi triwulan kedua pada akhir bulan Juni 2020 secara umum realisasi capaian keuangan atau penyerapan anggaran sebesar 57,22% dari anggaran setelah refocusing dan untuk realisasi kinerja sebesar 40%, dengan predikat penyerapan anggaran sangat tinggi sedangkan untuk realisasi kinerja menunjukkan predikat sedang.

Uraian lengkap perkegiatan yang merupakan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Pati**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran.</b>	<b>Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>								
1 05 01 01 01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	12.100 surat	2.200 surat	2.200 surat	2200surat	100	2.500 surat	6.900 surat	57
1 05 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, Pajak PBB dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	19 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening	100	4 jenis rekening	4 jenis rekening	60
1 05 01 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	137 unit	26 unit	-	-	-	-	-	-
1 05 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan perzinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	96 surat ijin kendaran dinas	20 surat ijin kendaraan dinas	19 surat ijin kendaraan dinas	19 surat ijin kend dinas	100	22 surat ijin kendaraan dinas	61 surat ijin kendaraan dinas	64
1 05 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	275 jenis	40 jenis	50 jenis	50 jenis	100	60 jenis	150 jenis	55
1 05 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiwaan selama setahun	269.000 lembar	54.000 lembar	54.000 lembar	54.000 lembar	100	54.000 lembar	162.000 lembar	60
1 05 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	57 unit	5 unit	15 unit	15 unit	100	12 unit	32 unit	56
1 05 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun.	5 unit	-	5 unit	2 unit	85	3 unit	5 unit	100
1 05 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun	1 set gordena	-	-	-	-	-	-	-
1 05 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	10 Jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6 jenis	60
1 05 01 01 17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	1.340 porsi	-	600 porsi	600 porsi	100	620 porsi	1.220 porsi	91

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi ke luar daerah.	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	1.520 laporan perjalanan	290 kali	290 kali	290 kali	100	300 kali	630 kali	41
1 05 01 01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun.	52orang/bulan (12 bulan)	5 orang	9 orang	9 orang	100	14 orang	28 orang	54
1 05 01 01 22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang.	54 orang/bulan (12 bulan)	10 orang	11 orang	8 orang	75	11 orang	22 orang	41
1 05 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.</b>								
1 05 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama setahun	5 unit	-	-	-		2 unit	2 unit	40
1 05 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	4 unit	-	4 unit	4 unit	100	-	4 unit	100
1 05 01 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun.	8 unit	-	8 unit	8 unit	100	-	1 unit	13



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05 01 02 17	Pengadaan Peralatan Komputer dan kelengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun.	13 unit	-	3 unit	3 unit	100	6 unit	6 unit	46
1	05 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun.	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	60
1	05 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional selama setahun.	143 unit pemeliharaan	4 unit	19 unit	19 unit	100	22 unit	45 unit	31
1	05 01 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>								
1	05 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	152 stel	26 stel	26 stel	26 stel	100	32 stel	84 stel	55
1	05 01 03 06	Pembinaan disiplin ASN	Persentase kehadiran ASN tepat waktu/bulan	84 orang	-	26 orang	26 orang	100	18 orang	44 orang	52
			Persentase pembinaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja	84 orang	-	26 orang	26 orang	100	18 orang	44 orang	52



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	1	15											
		<b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>											
1	05	01	15	1	Operasional keamanan tertutup (kominda)	Peningkatan kondusifitas daerah	11 orang	11 orang	-	-	-	-	11 orang	100
1	05	01	16		<b>Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>								
1	05	01	16	1	Fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	40 org	40 org	-	-	-	-	40 org	100
1	05	01	16	2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Sesat	Jumlah konflik horizontal dimasyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	16	3	Pemantauan Organisasi/Partai Terlarang	Jumlah kegiatan organisasi terlarang dimasyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan</b>								
1	05	01	17	1	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang Tri Kerukunan	150 orang	150 orang	-	-	-	-	150 org	100
1	05	01	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	300 orang	300 org	-	-	-	-	300 org	100
1	05	01	17	10	Fasilitasi kegiatan Ormas, LSM dan FKUB	Fasilitasi dewan penasehat FKUB di Kab. Pati	100 orang	100 org	-	-	-	-	100 org	100
1	05	01	17	11	Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama dan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	800 orang	-	150 org	150 org	100	200 org	350 org	44
						Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	830 orang	-	150 org	150 org	100	200 org	350 org	42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	17	12	Penyusunan data base Ormas dan LSM	Jumlah sitem data base Ormas LSM yang terupdate	4 database	-	1 database	1 data base	100	1 database	2 database	50
						Jumlah Ormas/LSM, OKP yang termonitior	4 laporan	-	1 lap	1 lap	100	1 lap	2 lap	50
1	05	01	17	13	Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Jumlah SMA/SMK yang berpasrtisipasi dalam pengembangan dan peningkatan wasbang, serta pembangunan moral	147 SMK	-	21 SMA/SMK	21 SMA/SMK	100	42 SMA/SMK	62 SMA/SMK	74
1	05	01	17	14	Sosialisasi dan pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara	84 SMK	-	21 SMA/SMK	21 SMA/SMK	100	21 SMA/SMK	42 SMA/SMK	50
1	05	01	17	15	Pencegahan Paham radikal kanan radikal kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	8 dokumen	-	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	50
1	05	01	17	16	Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	8 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dok	4 dok	50
						Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	60 orang	-	20 org	20 org	100	20 org	40 org	66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	5	1	18		<b>Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Peningkatan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan</b>								
1	05	1	18	2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat bermental pancasila	250 orang	250 org	-	-	-	-	250 org	100
1	05	01	18	2	Pentas seni dan Budaya Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Gebyar tari generasi muda persatuan kab. Pati	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	18	11	Penyusunan data Eks G 30 S PKI	Antisipasi terjadinya konflik dan tindak kriminal di masyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	20		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</b>								
1	05	01	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan miras dan narkoba	200 orang	200 org	-	-	-	-	200 org	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat								
1 05 01 21 3	Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah temu muka Ormas/LSM dengan Muspida di Kab. Pati	50 orang	50 org	-	-	-	-	50 org	100
1 05 01 21 4	Penyusunan data base parpol, Ormas dan LSM	Terinventarisir data base parpol, ormas dan LSM	40 org	40 org	-	-	-	-	40 org	100
1 05 01 21 6	Pendidikan Politik bagi pemilih	Peningkatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kab. Pati	100 orang	-	-	-	-	-	-	-
1 05 01 21 7	Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen yang dikelola	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	60
1 05 01 21 8	Peningkatan dan pendidikan politik bagi masyarakat	Jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, Ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	1900 orang	-	500 org	480 org	96	350 org	750 org	39
1 05 01 21 9	Penyusunan data base parpol	Jumlah sistem data base parpol yang terupdate	4 dok	-	1 dok	1	100	1 dok	2 dok	50

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Tahun 2020, perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa berubah kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur yang membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan urusan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam capaian sasaran strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah Indikator Tujuan; Prosentase Penurunan Konflik Sosial. Pada tahun 2019, target sebesar 80 % dengan capaian sebesar 25 % hal ini menunjukkan bahwa penurunan konflik yang terjadi di Kabupaten Pati dari tahun ke tahun semakin turun.
2. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah Indikator Sasaran; dengan indikator yaitu prosentase menurunnya demonstrasi anarkis. Pada tahun 2019, target sebesar



22 % dengan capaian sebesar 0% hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pati tidak ada demonstrasi yang anarkis.

3. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah Indikator Program 1; Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945 Pada tahun 2018, target sebesar 25 % dengan capaian sebesar 10 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi kurang dari target.
4. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah Indikator Program 2; dengan indikator yaitu Prosentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan Pada tahun 2019, target sebesar 55% dengan capaian sebesar 56% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi dengan target.
5. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah Indikator Program 3; dengan indikator yaitu Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades). Pada tahun 2019, target sebesar 75% dengan capaian sebesar 80% hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih dari target.

Secara umum untuk capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2019 melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PD dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup berhasil dan memuaskan, hal ini dibuktikan dengan target dan capaian kerjanya.

Pencapaian kinerja pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pati**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>											
1.	Prosentase Penurunan konflik sosial			80%	80%	25%	25%	25%	-	25%	25%	Merevisi renstra
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>											
2.	Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis			22%	16%	5%	5%	0%	-	0%	0%	Merevisi renstra
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>											
3.	Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45			0.06%	28%	19%	0.09%	10%	-	10%	10%	
4.	Persentase Ormas dan sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			55%	60%	65%	70%	56%	-	65%	70%	
5.	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, pilpres, pilkades)			75%	75%	75%	75%	80%	-	75%	80%	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja dan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa. Dalam hal ini di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Prosentase penurunan konflik sosial.
- b. Prosentase penurunan demonstrasi anarkis.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati akan melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pati pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pati berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam Pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam Pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.

Faktor yang penghambat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah menjamurnya Perkembangan Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya kontrol yang jelas serta minimnya Kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justru berdampak negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi dan Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

### **2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK"

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Pati tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017 – 2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : "Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan".

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertata-nya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dala pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilnya sistem politik sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

### **2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Untuk menyikapi isu-isu strategis tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi di Sekolah terkait Politik Kebangsaan dengan menysasar para pemilih pemula dan anggota Rohis;
5. Memperkuat Portal Kebangsaan gunaantisipasi berita bohong dan hasutan (hate speech);
6. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
7. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
8. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
9. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
10. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money polic;
11. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
12. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;

13. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia.
14. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan di Kabupaten Pati.

Berikut revidu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel dibawah :



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	2.600 surat	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	2.600 surat	2.500.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar selama setahun	12 bulan	41.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar selama setahun	12 bulan	33.600.000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesbangpol	jumlah peralatan kantor dan rumah tangga	4 unit	12.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesbangpol	jumlah peralatan kantor dan rumah tangga	4 unit	12.000.000	
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Badan Kesbangpol	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	19 unit	17.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Badan Kesbangpol	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	19 unit	5.700.000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kesbangpol	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun	12 bulan	60.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kesbangpol	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun	12 bulan	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	60 jenis	40.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	60 jenis	27.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif barang cetakan, penggandaan dan perjilidan selama setahun	54.000 lembar	30.00.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif barang cetakan, penggandaan dan perjilidan selama setahun	54.000 lembar	22.100.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	12 unit	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	12 unit	5.700.000	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	1 unit	26.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun		-	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kebutuhan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundangan selama setahun	2 jenis	3.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kebutuhan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundangan selama setahun	2 jenis	3.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Kesbangpol	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan selama setahun	630 porsi	15.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Kesbangpol	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan selama setahun	630 porsi	12.500.000	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	12 bulan	170.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	12 bulan	70.900.000	
13	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Badan Kesbangpol	jumlah upah harian tenaga keamanan dan sopir	14 orang	294.226.000	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Badan Kesbangpol	jumlah upah harian tenaga keamanan dan sopir	14 orang	263.975.000	
14	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Badan Kesbangpol	jumlah honor pengelola keuangan dan barang	9 orang	85.000.000	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Badan Kesbangpol	jumlah honor pengelola keuangan dan barang	9 orang	49.788.000	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan Kesbangpol	jumlah kendaraan dinas yang tersedia selama setahun	3 unit	60.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan Kesbangpol	jumlah kendaraan dinas yang tersedia selama setahun	2 unit	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pengadaan Mebeleur	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif mebelair yang diadakan selama setahun	1 unit	60.000.000	Pengadaan Mebeleur	Badan Kesbangpol	Jumlah komulatif mebelair yang diadakan selama setahun	-	-	
17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	7 unit	50.500.000	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	7 unit	20.500.000	
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	1 unit	11.640.000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional selama setahun	19 unit	104.928.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional selama setahun	19 unit	87.004.000	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>										
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	33 stel	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	33 stel	13.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Pembinaan disiplin ASN	Badan Kesbangpol	Prosentase pembinaan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	33 orang	67.600.000	Pembinaan disiplin ASN	Badan Kesbangpol	Prosentase pembinaan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	32 orang	2.500.000	
			Prosentase ASN tepat waktu perbulan	18 orang	10.000.000			Prosentase ASN tepat waktu perbulan	32 orang	-	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun selama setahun	7 laporan	60.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun selama setahun	7 laporan	8.000.000	
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										
23	pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Badan Kesbangpol	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wasbang serta pembangunan moral pancasila	100 siswa	120.000.000	pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Badan Kesbangpol	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wasbang serta pembangunan moral pancasila	100 siswa	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Penyusunan data base ormas, LSM dan aliran kepercayaan	Badan Kesbangpol	Jumlah ystem data base ormas/LSM yang terupdate	1 data base	60.000.000	Penyusunan data base ormas, LSM dan aliran kepercayaan	Badan Kesbangpol	Jumlah ystem data base ormas/LSM yang terupdate	1 data base	15.000.000	
			Jumlah Ormas/LSM dan OKP yang termonitor	1 lap	50.000.000			Jumlah Ormas/LSM dan OKP yang termonitor	1 lap	10.000.000	
25	Sosialisasi dan pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Badan Kesbangpol	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	100 siswa	120.000.000	Sosialisasi dan pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Badan Kesbangpol	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	100 siswa	55.000.000	
26	Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa	Badan Kesbangpol	Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	100 orang	70.000.000	Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa	Badan Kesbangpol	Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	100 orang	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 orang	50.000.000		Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 orang	-	
		Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 orang	50.000.000		Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 orang	-	
27	Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	2 dokumen	50.000.000	Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	2 dokumen	8.000.000	
28	Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	2 dokumen	270.000.000	Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	2 dokumen	125.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Badan Kesbangpol	Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan		-		Badan Kesbangpol	Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan		-	
<b>VI</b>	<b>Program Pendidikan politik masyarakat</b>										
29	Penyusunan Data Base partai politik	Badan Kesbangpol	Jumlah system data base parpol yang terupdate	1 dok	50.000.000	Penyusunan Data Base partai politik	Badan Kesbangpol	Jumlah system data base parpol yang terupdate	1 dok	10.000.000	
		Badan Kesbangpol	Terlaksananya penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan keuangan pada parpol	21 kec	30.000.000		Badan Kesbangpol	Terlaksananya penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan keuangan pada parpol	21 kec	-	
30	Peningkatan Pendidikan dan diskusi Politik bagi masyarakat	Badan Kesbangpol	Jumlah pemilih pemula pemilih perempuan ormas/LSM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	100 orang	200.000.000	Peningkatan Pendidikan dan diskusi Politik bagi masyarakat	Badan Kesbangpol	Jumlah pemilih pemula pemilih perempuan ormas/LSM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	100 orang	49.727.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	1 dok	30.000.000	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	1 dok	10.000.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>2.407.654.000</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>1.058.234.000</b>	

## 2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mendorong ketertiban Parpol, Ormas, LSM dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan mendorong ke arah kehidupan kemasyarakatan yang menghormati hak-hak azasi manusia, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbang RKPD kecamatan, khususnya program dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dengan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri. Untuk usulan pada tahun 2021 **tidak ada** usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 2.4  
Usulan Prgram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2021 Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen, dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internal, serta pendidikan kewarganegaraan.
2. Bina Ideologi dan Wawasan kebangsaan yang diserahkan pada pembangunan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan politik dan pemerintahan umum kepada manajemen konflik, penangan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se-Indonesia, serta penyusunan rumus kebijakan berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Nasional, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan dengan indikator diarahkan pada:
  - a. Fungsi, Peran, koordinasi dan Fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan) dan forum publik, penanganan masalah sosial, serta perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan - kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
  - b. Ketahanan ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, dan pengembangan

ketahanan, ekonomi serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik dalam negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik dalam negeri.

Merujuk pada kebijakan nasional pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Kesekretariat, dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi badan serta pemenuhan sarana dan prasarana badan serta penyelenggara koordinasi badan/kantor/forum/ormas di Kabupaten pati.
2. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan, dan pengembangan ideologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsa dan pembauran bangsa, kedua hal ini meliputi fasilitasi antara lain: FKUB, FPK, FKDM, dan sosialisasi ideologi negara dan bela negara serta wawasan dan pembauran kebangsaan bagi masyarakat, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasioanal maupun daerah berkenaan dengan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan.
3. Kewaspadaan Daerah yang difokuskan kepada kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik di Kabupaten Pati, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaiatan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam.
4. Ketahanan ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi, serta ketahanan seni, budaya, agama kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan meliputi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, penyelenggaraan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah-daerah berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.

5. Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Kabupaten Pati.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022, khususnya perencanaan tahun ketiga. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tahun 2021 mengacu pada RPJMD dengan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”**. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, telah ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017 – 2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : "Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan".

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut: "Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945".

Pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 masuk tahun ke-empat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Target
<b>Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal</b>					
1.	Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	a. Prosentase Penurunan konflik sosial	%	25
			b. Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	%	5

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk tahun 2021 ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati terdapat sebanyak 6 program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.058.234.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Non Urusan terdiri atas 4 program dan 20 kegiatan dengan anggaran Rp. 695.507.000,-
- Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar urusan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat terdiri atas 2 program dan 9 kegiatan dengan anggaran Rp. 362.727.000,-

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Pati, dengan sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP), Pelajar dan Mahasiswa.

Penggunaan anggaran tersebut nantinya salah satunya dialokasikan untuk penanganan New Normal dari langkah adanya pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pati.

Pada rancangan akhir ini tidak ada perbedaan program dan kegiatan jika dibandingkan dengan rancangan awal yaitu 6 program dan 29 kegiatan. Sedangkan untuk pagu anggaran dari rencana awal renja sampai dengan rencana akhir renja tetap sebesar Rp. 1.058.234.000,-. Pembagian anggaran ini disesuaikan dengan kemampuan daerah dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

### **3.4 Strategi dalam Penanganan COVID-19**

Tahun 2021 dianggap sebagai tahun pemulihan COVID-19 dengan mempertimbangkan asumsi pandemi Covid-19 selesai di tahun 2020. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 ini dalam pemulihan Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya fokus pada :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kondusivitas lingkungan, dengan pengaktifan kegiatan siskamling serta penglibatan TOGA/TOMAS dalam kegiatan masyarakat sebagai corong informasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 serta mengantisipasi dan mewaspadaai setiap penyebaran informasi berita hoaks mengenai Covid-19.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum mitra Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Bela Negara, serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan, penularan serta penanganan Corona melalui berbagai upaya yang bersifat mendidik dan tidak menimbulkan kepanikan dimasyarakat melalui penyampaian penjelasan, bimbingan, himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pati sudah menerapkan Nomenklatur yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program dan kegiatan terlampir). Serta sudah menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mengacu pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, SIPD menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, selanjutnya diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mendapatkan alokasi anggaran sesuai dalam RKPD Kabupaten Pati yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp 1.058.234.000,- APBD Provinsi/Bankeu Provinsi sebesar Rp 0, dan APBN sebesar Rp 0.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum sebagai berikut :

## **Non Urusan**

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan pembayaran pajak
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan
13. Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang

### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan komputer dan kelengkapannya
3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pembinaan disiplin ASN

### **IV. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar/ Bidang Urusan  
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

**V. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan**

1. Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
2. Penyusunan Data Base Ormas, LSM dan Aliran Kepercayaan
3. Sosialisasi dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
4. Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa
5. Pencegahan paham radikal kanan dan radikal kiri
6. Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini

**VI. Program pendidikan politik masyarakat**

1. Penyusunan data base Parpol, Ormas, dan LSM
2. Peningkatan pendidikan dan diskusi politik bagi masyarakat
3. Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2021 melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Tahun Anggaran 2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1 05 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>512.863.000</b>				<b>864.726.000</b>	
1 05 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	BAKESBANGPOL	2.600 surat	2.500.000	APBD		2.600 surat	5.000.000	
1 05 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar selama setahun	BAKESBANGPOL	25 rekening	33.600.000	APBD		25 rekening	50.000.000	
	003	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	jumlah peralatan kantor dan rumah tangga	BAKESBANGPOL	2 unit	12.000.000	APBD	Butuh Ac untuk ruangan rapat	5 Unit	35.000.000
1 05 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	BAKESBANGPOL	15 unit	5.700.000	APBD	Kendaraan bertambah	19 unit	20.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun	BAKESBANGPOL	1.700m2	4.000.000	APBD	Tersedianya cleaning service	1.700m2	60.000.000
1	05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	BAKESBANGPOL	60 unit	27.000.000	APBD		65 unit	41.000.000
1	05	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah komulatif barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	BAKESBANGPOL	54.000 lembar	22.100.000	APBD		54.000 lembar	40.000.000
1	05	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	BAKESBANGPOL	12 unit	5.700.000	APBD		15 unit	10.000.000
1	05	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	BAKESBANGPOL	-	-	APBD		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundangan selama setahun	BAKESBANGPOL	2 jenis	3.100.000	APBD		2 jenis	3.500.000
1	05	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan selama setahun	BAKESBANGPOL	630 porsi	12.500.000	APBD		650 porsi	15.000.000
1	05	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	BAKESBANGPOL	200 kali	70.900.000	APBD		320 kali	194.000.000
1	05	01	01	019	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis/ Keamanan	jumlah upah harian tenaga keamanan dan sopir	BAKESBANGPOL	12 orang	263.975.000	APBD	Honor THL	12 orang	88.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 01 01 022	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	jumlah honor pengelola keuangan dan barang	BAKESBANGPOL	9 orang	49.788.000	APBD		11 orang	85.000.000
1 05 01 01	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>159.144.000</b>				<b>264.000.000</b>
1 05 01 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang tersedia selama setahun	BAKESBANGPOL	2 unit	40.000.000	APBD		4 unit	50.000.000
1 05 01 02 010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebelair yang diadakan selama setahun	BAKESBANGPOL	-	-	APBD		-	-
1 05 01 02 017	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	BAKESBANGPOL	4 unit	20.500.000	APBD		4 unit	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	BAKESBANGPOL	1 unit	11.640.000	APBD		1 unit	28.000.000
1	05	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional selama setahun	BAKESBANGPOL	3 unit	87.004.000	APBD		23 unit	-
1	05	01	03		<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>				<b>15.500.000</b>				<b>105.000.000</b>
1	05	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	BAKESBANGPOL	32 stel	13.000.000	APBD		32 stel	13.000.000
2	05	01	03	006	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah pembinaan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	BAKESBANGPOL	26 orang	2.500.000	APBD		32 orang	15.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
		Jumlah ASN tepat waktu perbulan	BAKESBANGPOL	26 orang	-	APBD		35 orang	15.000.000				
1	05	01	06	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		8.000.000			<b>65.000.000</b>				
1	05	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang susun selama setahun	BAKESBANGPOL	7 laporan	8.000.000	APBD		11 laporan	20.000.000
1	05	01	17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>									
1	05	01	17	008	pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wasbang serta pembangunan moral pancasila	BAKESBANGPOL	42 SMA/SMK	30.000.000	APBD		42 SMA/SMK	120.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	17	021	Penyusunan data base ormas, LSM dan aliran kepercayaan	Jumlah system data base ormas/LSM yang terupdate	BAKESBANGPOL	1 data base	15.000.000	APBD		1 data base	45.000.000
						Jumlah Ormas/LSM dan OKP yang termonitor	BAKESBANGPOL	1 lap	10.000.000	APBD		1 laporan	-
1	05	01	17	027	Sosialisasi dan pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	BAKESBANGPOL	21 SMA/SMK	55.000.000	APBD		21 SMA/SMK	150.000.000
1	05	01	17	030	Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	BAKESBANGPOL	100 orang	50.000.000	APBD		200 orang	210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	BAKESBANGPOL	100 orang	-	APBD		100 orang	-
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	BAKESBANGPOL	100 orang	-	APBD		100 orang	-
1	05 01 17 031	Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	BAKESBANGPOL	1 dokumen	8.000.000	APBD		2 dok	64.999.997

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	17	032	Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	BAKESBANGPOL	2 dokumen	125.000.000	APBD		2 dok	280.000.000
						Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	BAKESBANGPOL	-	-			-	-
1	05	01	01		<b>Program Pendidikan politik masyarakat</b>				<b>69.727.000</b>				<b>350.000.000</b>
1	19	01	21	004	Penyusunan Data Base partai politik	Jumlah system data base parpol yang terupdate	BAKESBANGPOL	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	50.000.000
						Terlaksananya penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan keuangan pada parpol	BAKESBANGPOL	21 kec	-			21 kec	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	19	01	21	012	Peningkatan Pendidikan dan diskusi Politik bagi masyarakat	Jumlah pemilih pemula pemilih perempuan ormas/LSM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	BAKESBANGPOL	200 orang	49.727.000	APBD		200 orang	200.000.000
1	19	01	21	013	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	BAKESBANGPOL	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	50.000.000
					<b>JUMLAH</b>				<b>1.058.234.000</b>				<b>1.994.499.997</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya tahun 2021. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2021.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renja perangkat daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PATI**  
**NOMOR 050/2269 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Pati  
 Nomor : 050/2269 Tahun 2020  
 Tanggal : 30 Juli 2020

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

PERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATI F (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATI F (Rp. 000)	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Non Urusan							Pemerintahan Umum									8					
												Kesatuan Bangsa dan Politik								8	01				
1	05	01	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan persentase pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date).						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date).						8	01	01			
														Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun					8	01	01	2.01		
1	05	01	06	05				Penyusunan Renja PD	Jumlah dokumen renja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	8.000								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	2.000	8	01	01	2.01	01



PERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	05	01	06	06					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD	Jumlah dokumen RKA dan dokumen DPA SKPD yang disusun selama setahun								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun selama setahun	1.000	8	01	01	2.01	02	
1	05	01	06	01					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun selama setahun								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun selama setahun	1.000	8	01	01	2.01	05	
																Administrasi Keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date).					8	01	01	2.02	
1	05	01	06	02					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun selama setahun								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun selama setahun	2.000	8	01	01	2.02	07	



PERMENDAGRI 13 / RKP/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Non Urusan							Pemerintah Umum									8				
												Kesatuan Bangsa dan Politik									8	01		
1	05	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan administrasi perkantoran						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran							8	01	01	
														Administrasi Umum	Jumlah peningkatan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran						8	01	01	2.03
1	05	01	01	01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	2.500							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	2.500	8	01	01	2.03	01
1	05	01	01	02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	33.600							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	33.600	8	01	01	2.03	02
1	05	01	01	06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan	5.700							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	5.700	8	01	01	2.03	06

PERMENDAGRI 13 / RKP/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	05	01	01	08					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan	4.000							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun.	4.000	8	01	01	2.03	08	
1	05	01	01	10					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	27.000								Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	27.000	8	01	01	2.03	10
1	05	01	01	11					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	22.100								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan selama setahun	22.100	8	01	01	2.03	11
1	05	01	01	12					Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.700								Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	5.700	8	01	01	2.03	12
1	05	01	01	13					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.000								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.000	8	01	01	2.03	13
1	05	01	01	15					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3.100								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	3.100	8	01	01	2.03	15

PERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	05	01	01	17					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan	12.500							Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun	12.500	8	01	01	2.03	16
																		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun		8	01	01	2.03	17
1	05	01	01	18					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	70.900							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	70.900	8	01	01	2.03	18
1	05	01	01	19					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah Upah Harian Tenaga Keamanan dan sopir	263.975							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	263.975	8	01	01	2.03	04
									Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun.	-								Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun.	-					
1	05	01	01	22					Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah honor pengelola keuangan	49.788									49.788					









PERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Pemerintah Pelayanan Dasar							Pemerintah Umum										8				
					Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							Kesatuan Bangsa dan Politik									8	01			
1	05	01	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan							8	01	02		
							Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan																		
1	05	01	17	08				Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan, serta pembangunan moral pancasila	30.000							Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peningkatan sekolah yang mendapat pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			8	01	02	2.01	



PERMENDAGRI 13 / RKP/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
																	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	-	8	01	02	2.01	03
													Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45						8	01	05		
1	05	01	17	11				Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	50.000					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	jumlah peningkatan LSM, Ormas dan OKP yang mendapat pembinaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			8	01	05	2.01		



PERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	05	01	21			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkadaes)						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkadaes)						8	01	03			
1	05	01	21	11				Peningkatan Pendidikan dan diskusi politik bagi masyarakat	jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	49.727					Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan politik dalam negeri	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)				8	01	03	2.01		
																	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pemilih pemula yang ikut kegiatan pendidikan politik	49.727	8	01	03	2.01	01	

FERMENDAGRI 13 / RKPD/ RENJA								FERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
																		Jumlah ormas, LSM, tomas/ toga yang ikut pengutusan peran politik							
																	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum diskusi politik		8	01	03	2.01	04	
1	19	01	21	07				Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Jumlah dokumen yang dikelola	10.000															
																	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	10.000	8	01	03	2.01	02	



PERMENDAGRI 13 / RKP/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	05	01	17	15					Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	8.000					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pertumbuhan LSM, Ormas, OKP yang mendapatkan pembinaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				8	01	04	2.01	
																	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	8.000	8	01	04	2.01	01	
																	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari FGD dibidang ormas selama setahun		8	01	04	2.01	03	







PERMENDAGRI 13 / RKP/ RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
																<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah fasilitasi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik</p>	125.000	8	01	06	2.01	04
																	<p>Jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM</p>						

PERMENDAGRI 13 / R/KPD/REHLA								PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2019													
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
														Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertaskannya pemantauan dan pengawasan WNA dan lembaga asing		8	01	06	2.01	05



**BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PATI**

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Pati T (0295) 383231 Fax 384324

Email : [kesbangpol@patikab.go.id](mailto:kesbangpol@patikab.go.id)